TRIBUN PONTIANAK

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2020 | Hal.: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

news analysis

Prof Eddy Suratman
Pengamat Ekonomi Untan

Tindakan Tegas

MENURUT saya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalbar yang mencapai Rp 950 miliar lebih sangat tinggi sekali. Tapi tentu ini bukan kesalahan sekarang, sudah menumpuk dari dulu. Berarti kita memang belum pernah sungguh-sung-

■ Bersambung **ke hal. 7**

Tindakan Tegas

Sambungan **Hal.1**

guh mengambil kebijakan yang membuat orang takut untuk tidak membayar pajak kendaraanbermotor.

Seharusnya, ada kebijakan membuat efek jera. Selama ini, mungkin kita belum terlalu memperhatikan soal penumpukan penunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut.

Saya kira apa yang dilakukan sekarang ini pengulangan dari yang sudah-sudah dari sebelumnya seperti penghapusan denda. Dulu pun sudah pernah dilakukan juga. Kemudian razia. Namun ada pemilik yang menyembunyikan kendaraannya karena tahu musim razia.

Saya melihat sekarang era digitalisasi tidak bisakan kita memindahkan seluruh data pemilik kendaraan bermotor itu dalam satu file menggunakan konsep digital. Sehingga setiap kendaraan bermotor terhubung dengan nomor handpone pemiliknya sehingga menjelang jatuh tempo PKB-nya ada peringatan kepada yang bersangkutan. Bisa melalui WhatsApp dalam tiga bulan ke depan.

Banyak juga orang yang mau membayar tapi juga lalai. Sekalian dengan peringatan itu bisa disampaikan ancamannya kalau tidak dibayar akan ada berdasarkan perda nomor sekaian kah untuk memberi tahu resikonya. Itu kita membuat konsep digitalnya untuk memudahkan orang wajib pajak itu untuk membayar .

Kemudian untuk mempermudah orang wajib pajak tidak perlu datang. Jadi orang yang sudah ada mobile banking, SMS Banking, ATM atau Bank jadi bisa bayar lewat itu untuk memidahkan. Kalau itu semua sudah dilakukan masih bandel juga kita bisa ambil tindakan keras.

Pajak itu memang boleh dilakukan upaya paksa. Itulah penngertian pajak, kalau tidak membayar anda dapat dikenakan sanksi. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memaksa. Itulah pajak. Selama ini, saya kawatir itu tidak dilakukan sehingga orang santai saja yang bayar dan yang tak bayar sama saja.

Saya memperhatikan, banyak sekali pelat orang tidak bayar pajak padahal pakai mobil dan bukan orang miskin. Itusi boleh saja, namanya juga stategi. Sama juga ketika pemeritah pada 2016 melakukan penghapusan denda pajak. Itu mirip-mirip dan realisasi yang didapatkan hampir sama dengan yang ditargetkan.

Semua yang dilakukan Bapenda masuk dalam kebiasaan di negara lain. Itu oke, tetapi itu tidak mengubah kebiasaan pembayar pajak kita dan tidak akan mengurangi penunggakan yang besar.

Perlu diketahui, Rp 904 miliar tunggakan pajak PKB sangat besar sehingga harus ada upaya besar dengan perubahan sistem yang selama ini masih menggunakan sistem manual berpindah ke sistem digital dan memberikan peringatan melalui digital pada wajib pajak.

Orang diingatkan terus menerus bahwa dia tinggal berapa bulan lagi setelah itu baru diberikan sanksi yang berat yang menyebabkan orang jera. Selama ini orang berani karena pemerintah tidak tegas.

Saya kira jalan yang ada di Kalbar akan digunakan untuk kepentingan ekonomi dan sosial dan kita semua harus wajib pajak kalau kita tidak wajib pajak bagaimana pemerintah bisa memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan lainnya.

Jadi sebagai warga negara wajib untuk membayar pajak. Kalau kata wajib tidak dilakukan, maka berdosa. Kalau tidak dilakukan bisa dikenakan sanki hukum dan kesadaran itu penting. Menurut saya dan saya selalu berusaha tepat waktu bayar pajak.

Harus wajib bayar pajak karena pemerintah mendapatkan penghasilan dari pajak itu untuk membangun. Kalau kita tidak bayar pajak jangan marah kalau pemerintah tidak mampu menyediakan kebutuhan kita. **(ang)**